

LAPORAN HASIL PENELITIAN



**ANALISIS MUATAN NILAI-NILAI KEWARGANEGARAAN
GLOBAL DALAM BUKU SISWA PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN KELAS XII KURIKULUM 2013**

Peneliti:

Dr. Mukhamad Murdiono, M.Pd: NIP. 197806302003121002
Dr. Suharno, M. Si. : NIP. 196804172000031001
Dr. Wuri Wuryandani, M.Pd. : NIP. 198009292005012001
Wartono, S. Pd. : NIM. 15730251020
Triyani, S. Pd. : NIM. 15730251026

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
OKTOBER 2016**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

1. a. Judul Penelitian : Analisis Muatan Nilai-nilai Kewarganegaraan Global Dalam Buku Siswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Kelas XII Kurikulum 2013
 - b. Jurusan : Program Pascasarjana
 - c. Bidang Ilmu : Pendidikan
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama : Dr. Mukhamad Murdiono, M. Pd.
 - b. NIP/Golongan : 19780630 200312 1 002 / III d.
 - c. Pangkat/Jabatan : Penata / Lektor
 - d. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 - e. HP dan e-mail : 08156870193/ mukhamad_murdiono@uny.ac.id
3. Jumlah Anggota Peneliti : 5 orang
 - a. Anggota Dosen : 3 orang
 - b. Anggota Mahasiswa : 2 orang
4. Lokasi Penelitian : Yogyakarta
5. Kerjasama dengan Institusi Lain :
 - a. Nama Institusi : -
 - b. Alamat : -
6. Waktu Penelitian : 5 (Lima) Bulan
9. Biaya yang Diperlukan :
 - a. DIPA Pascasarjana : Rp. 17.500.000
 - b. Sumber Lain : -

Yogyakarta, 26 September 2016

Mengetahui,
Ketua Prodi PPKn

Ketua Tim Peneliti,

Dr. Suharno, M.Si.
NIP. 19680417 200003 1 001

Dr. Mukh. Murdiono, M.Pd
NIP. 19780630 200312 1 002

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UNY

Dr. Moch. Bruri Triyono
NIP. 19560216 198603 1 003

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah, dzat Yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Kami harus bersimpuh menghaturkan syukur hanya karena pertolongan dan karunia-Nya laporan hasil penelitian kelompok yang berjudul “Analisis Muatan Nilai-Nilai Kewarganegaraan Global Dalam Buku Siswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Kelas XII Kurikulum 2013” dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang nilai-nilai kewarganegaraan global yang dimuat dalam buku siswa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas XII Kurikulum 2013. Nilai-nilai kewarganegaraan global penting untuk dikembangkan agar peserta didik memiliki bekal dan kemampuan menghadapi tantangan di era global. Mata pelajaran PPKn memiliki peran strategis dalam mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan global dalam proses pembelajaran. Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan penelitian ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak. Untuk itu sudah sepantasnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan penelitian ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan ijin kepada tim peneliti untuk melakukan penelitian.

Terakhir peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu sumbangsih kritik dan saran dari pembaca selalu kami nantikan demi perbaikan laporan penelitian ini. Meskipun masih banyak kelemahan tetapi kami berharap laporan hasil penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya untuk pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan.

Yogyakarta, September 2016

Tim Peneliti

ABSTRAK

ANALISIS MUATAN NILAI-NILAI KEWARGANEGARAAN GLOBAL DALAM BUKU SISWA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN KELAS XII KURIKULUM 2013

Oleh:

Dr. Mukhamad Murdiono, M. Pd.

Dr. Suharno, M. Si.

Dr. Wuri Wuryandani, M. Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis muatan nilai-nilai kewarganegaraan global dalam buku teks siswa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas XII Kurikulum 2013. Nilai-nilai kewarganegaraan global penting untuk dikembangkan di era global agar peserta didik sebagai warga negara muda memiliki pemahaman global yang baik dan mampu untuk berinteraksi dengan warga negara lain di berbagai belahan dunia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis isi (*content analysis*). Unit analisis dalam penelitian ini adalah isi dari buku teks pegangan siswa pada mata pelajaran PPKn untuk Kelas XII Kurikulum 2013. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan langsung pada buku teks siswa untuk mata pelajaran PPKn pada kelas XII berdasarkan kategorisasi yang telah ditentukan. Analisis dilakukan untuk menemukan nilai-nilai kewarganegaraan global yang terkandung dalam buku tersebut dengan cara menganalisis tiap halaman pada setiap bab. Kajian isi dokumen secara kualitatif dengan teknik *coding* terhadap nilai kewarganegaraan global yang terdapat dalam buku teks siswa PPKn kelas XII baik tampilan verbal (kata-kata, kalimat, wacana) maupun visual (gambar) yang memiliki makna nilai-nilai kewarganegaraan global.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) nilai-nilai kewarganegaraan global yang muncul dalam buku teks siswa PPKn untuk kelas XII Kurikulum 2013 antara lain: : keadilan sosial dan kejujuran, menghormati keragaman, kepedulian terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, globalisasi dan saling ketergantungan, perdamaian dan konflik, berpikir kritis, kemampuan berpendapat secara kritis, kemampuan melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan, menghormati orang lain, kerjasama dan resolusi konflik, rasa identitas dan harga diri, empati dan rasa kemanusiaan, menghargai perbedaan, kesenjangan dan keadilan sosial, peduli, tanggungjawab pribadi dan saling keterkaitan global, kesadaran diri, komunikasi antarbudaya, dan pengetahuan global; (2) nilai-nilai kewarganegaraan yang paling dominan atau seringkali muncul dalam buku teks siswa yakni nilai kemampuan untuk berpendapat secara efektif.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Laporan Hasil Penelitian	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Hasil Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Hakikat dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Global	8
B. Nilai-nilai Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Global	12
C. Karakteristik Pembelajaran Kewarganegaraan	14
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	19
B. Pengumpulan Data	19
C. Unit Analisis	19
D. Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	21
B. Pembahasan	24
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	34
B. Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang terus berkembang dan terjadi hampir di seluruh negara di dunia, ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk kemajuan di bidang teknologi. Kemajuan di bidang teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi, menjadikan dunia tempat berpijak semakin tanpa batas (*borderless*). Peristiwa yang terjadi di suatu negara dapat dengan mudah diketahui oleh seseorang yang berada di negara lain. Informasi dengan cepat mengalir ke berbagai belahan dunia dengan bantuan teknologi internet. Penggunaan teknologi internet memudahkan orang di seluruh penjuru planet bumi untuk mengakses informasi tanpa mengenal batas waktu dan wilayah. Internet dapat berperan dalam pertukaran informasi dan ide-ide antara pemerintah dan warga negara (Kim dkk. 2011: 809). Dunia yang tanpa batas di era global tidak hanya menyebabkan informasi yang datang dari negara lain dapat dengan mudah masuk ke suatu negara, tetapi juga sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh setiap negara.

Informasi yang datang silih berganti memiliki dampak terhadap kehidupan warga negara di dunia. Ideologi, gaya hidup, dan keyakinan atau kepercayaan yang berkembang di suatu negara dapat mempengaruhi kebiasaan dan pola-pola kehidupan yang sudah mapan di negara lain. Nilai-nilai dasar dalam bentuk ideologi bangsa yang telah lama dijadikan sebagai landasan bagi kehidupan warga negara perlahan mulai terkikis. Gejala mulai terkikisnya nilai-nilai dasar ini sangat kentara dari perilaku yang ditunjukkan generasi muda. Perilaku yang menjadi kecenderungan global, seperti gaya hidup yang hedonis dan konsumtif sangat mudah ditiru oleh generasi muda. Apabila perilaku imitatif berlebihan terhadap kecenderungan global dibiarkan, tidak menutup kemungkinan nilai-nilai dasar itu dapat luntur dan pudar.

Pemuda memang produk zamannya, generasi muda di era global lebih pragmatis dalam menentukan pilihan. Kaum muda seperti tidak memiliki idealisme lagi, dan yang lebih mengemuka adalah perilaku egoisme dan konsumerisme. Jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang harian Kompas pada 21-24 Oktober 2012 terhadap 819 responden yang minimal berusia 17 tahun menunjukkan bahwa pemuda dianggap terlalu sibuk dengan persoalan internal dirinya dan berorientasi kepada diri sendiri (egois) sehingga cenderung mengabaikan masyarakat. Penilaian ini diungkapkan oleh 73,1 persen responden (Kompas, 29 Oktober 2012: 5).

Kecenderungan dan gaya hidup yang berkembang di negara maju akan diikuti oleh negara-negara yang sedang berkembang. Pola hidup konsumerisme dan hedonistik yang tumbuh subur di masyarakat Barat dengan budaya individualisme, perlahan mencemari budaya luhur bangsa-bangsa Timur yang terkenal santun dan memiliki semangat kolektivisme kuat. Globalisasi yang terus berkembang di abad ke-21 mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk keyakinan, norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku, serta ekonomi dan perdagangan (Banks, 2008, hlm. 132). Persoalan kecenderungan global yang dapat mengikis nilai-nilai luhur bangsa perlu dihadapi dan diberikan jalan keluar. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan penguatan nilai-nilai luhur bangsa yang dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam melakukan penguatan nilai-nilai yang dijadikan sebagai falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Nussbaum (Banks, 2008: 134) pendidikan kewarganegaraan harus membantu siswa mengembangkan identitas dan keterikatan pada komunitas global dan hubungan manusia kepada orang lain di seluruh dunia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membangun generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Warga negara yang baik setidaknya tercermin dari tiga aspek utama pendidikan kewarganegaraan yang bermutu.

Ketiga aspek itu meliputi: (1) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), (2) kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan (3) watak-watak kewarganegaraan (*civic dispositions*) (Branson, 1999: 8). Pengetahuan kewarganegaraan antara lain berkaitan dengan apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Kecakapan kewarganegaraan dalam suatu negara dapat berupa kecakapan intelektual dan partisipatoris. Watak-watak kewarganegaraan merupakan sifat-sifat publik dan privat utama yang dimiliki warga negara untuk pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Permasalahan-permasalahan global lintas negara yang muncul sebagai akibat gempuran globalisasi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat memerlukan pemecahan melalui pendekatan baru dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan baru ini disebut Charles Titus sebagai *civic education* untuk pemahaman global, yaitu berupa cara pandang dan dedikasi baru pada pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan ini pernah diujicobakan oleh Boulding (Titus, 1999: 131-132) di Amerika dengan kesimpulan bahwa warga Amerika mengakui sebagai penduduk planet yang menjadi desa buwana (*global village*). Keadaan seperti ini mensyaratkan perhatian dan aksi warga negara pada skala lintas negara dan lintas budaya. Dengan demikian, jelas perlu ada perspektif baru dalam mengembangkan budaya yang disebut Boulding (1988) sebagai "*global civic culture*" atau yang sekarang biasa dikenal dengan "*transnational civil society*" (Parker dkk. 1999: 130).

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun wawasan global warga negara. Pendidikan kewarganegaraan tidak sebatas mempelajari hak dan kewajiban warga negara, melainkan lebih luas dan mendalam termasuk mempersiapkan warga negara menjadi warga global. Pendidikan kewarganegaraan membekali peserta didik di sekolah dengan pengetahuan tentang isu-isu global, budaya, lembaga dan sistem internasional dan merupakan indikasi dari pendekatan minimalis yang bisa mengambil tempat secara eksklusif di dalam kelas. Osler & Starkey (Bourke dkk. 2012: 163) mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan

mencerminkan pendekatan maksimal yang bertujuan untuk memastikan peserta didik siap untuk mengambil peran sebagai warga global dewasa dan bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan untuk membangun wawasan global sangat diperlukan bagi peserta didik sebagai warga negara muda. Agbaria (2011: 61-62) menjelaskan pentingnya pendidikan global untuk membangun wawasan global warga negara di era global. Generasi muda akan menghadapi tatanan dunia baru. Kontak sehari-hari mereka mencakup individu dari beragam etnis, jenis kelamin, bahasa, ras, dan latar belakang sosial ekonomi. Mereka akan mengalami beberapa masalah yang serius seperti: kesehatan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, ledakan penduduk, migrasi transnasional, nasionalisme etnis, dan penurunan negara-bangsa. Semua anak, tanpa memandang tempat kelahiran, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Tetapi, anak-anak yang berhasil menyelesaikan pendidikan (lulusan) di abad ke-21 harus dilengkapi dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi warga negara yang kompeten, bertanggung jawab dan manusiawi.

Penelitian yang dilakukan Bourke dkk. (2012: 164) menunjukkan bahwa peserta didik yang memiliki kesadaran tinggi cenderung dapat diandalkan, lebih hati-hati, teliti, bertanggung jawab, terorganisasi, berorientasi pada prestasi dan selalu siap sebagai warga negara. Lebih lanjut, Bourke dkk. menambahkan bahwa mereka yang memiliki keramahan tinggi umumnya dianggap baik hati, fleksibel, kooperatif, peduli, sopan, percaya diri dan toleran. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh peserta didik dapat menjadi bekal mereka untuk membentuk kepribadian sebagai warga dunia. Penelitian sejenis yang dilakukan Gainous & Martens (2012: 253) juga membuktikan bahwa pendidikan kewarganegaraan terbukti efektif untuk membangun kompetensi politik dan warga negara muda yang demokratis dan bertanggungjawab.

Untuk membangun wawasan global warga negara muda, pendidikan kewarganegaraan lebih menekankan pada pengembangan peserta didik agar

memiliki sikap dan kemauan melakukan interaksi dengan sesama manusia yang mendasarkan pada prinsip-prinsip menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Ada dua prinsip yang mendasari prinsip-prinsip moral yang akan dikembangkan sebagai warga negara, yaitu simpati dan respek. Simpati merupakan nilai-nilai dan sikap yang dimiliki seseorang untuk selalu memberikan perhatian kepada orang lain, terutama jika dalam keadaan yang tidak lebih baik dari diri kita. Respek dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menjaga diri sendiri dari perbuatan yang dapat merugikan atau mengganggu hak-hak yang dimiliki oleh orang lain (Zamroni, 2007: 127). Dengan demikian, pengembangan pendidikan kewarganegaraan selain menekankan pada aspek pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap juga harus menumbuhkan respek dan empati yang bersifat global, melewati batas-batas bangsa dan negara.

Uraian yang telah dikemukakan, menjadi alasan pentingnya nilai-nilai kewarganegaraan global perlu untuk ditanamkan pada peserta didik di sekolah melalui pendidikan kewarganegaraan. Perubahan Kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013 mengubah substansi atau ruang lingkup kajian pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan pada Kurikulum 2006 mencakup: persatuan dan kesatuan bangsa; norma, hukum, dan peraturan; hak asasi manusia; kebutuhan warga negara; konstitusi negara; kekuasaan dan politik; Pancasila; dan globalisasi. Sementara dalam Kurikulum 2013 ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan mencakup: Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa; UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; bhinneka tunggal ika sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh; dan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara Indonesia. Dari ruang lingkup tersebut, dapat dicermati bahwa ruang lingkup tentang globalisasi sudah tidak ada lagi dalam Kurikulum 2013. Padahal ruang lingkup globalisasi sangat penting bagi peserta didik untuk mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan global.

Keberhasilan pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan kewarganegaraan di sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting antara lain: kualitas proses pembelajaran, profesionalisme guru, dan sarana penunjang pembelajaran. Salah satu sarana pembelajaran yang digunakan untuk pencapaian tujuan pendidikan yakni buku pelajaran. Pemberlakuan Kurikulum 2013 untuk beberapa sekolah yang telah siap melaksanakan, dibarengi dengan penggunaan buku teks pelajaran yang telah disiapkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku teks pelajaran yang telah disiapkan oleh pemerintah meliputi buku teks pelajaran pegangan siswa dan buku pedoman guru. Kurikulum 2013 sangat menekankan pada penanaman nilai-nilai karakter dan budaya kepada peserta didik sejak usia dini. Fokus pembelajaran tidak hanya pada materi pelajaran, melainkan juga pada penanaman nilai-nilai karakter. Penanaman nilai-nilai kepada peserta didik tidak hanya nilai-nilai kewarganegaraan nasional, tapi juga nilai-nilai kewarganegaraan global (*global citizenship*). Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan analisis terhadap buku teks pelajaran PPKn, apakah nilai-nilai kewarganegaraan global telah terakomodir dalam Kurikulum 2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apa saja nilai-nilai kewarganegaraan global yang terkandung dalam buku teks pelajaran siswa mata pelajaran PPKn Kelas XII Kurikulum 2013?
2. Apakah nilai-nilai kewarganegaraan global paling dominan yang terkandung dalam dalam buku teks pelajaran siswa mata pelajaran PPKn Kelas XII Kurikulum 2013?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Menemukan nilai-nilai kewarganegaraan global yang terkandung dalam buku teks pelajaran siswa mata pelajaran PPKn Kelas XII Kurikulum 2013.

2. Menemukan nilai-nilai kewarganegaraan global paling dominan yang terkandung dalam dalam buku teks pelajaran siswa mata pelajaran PPKn Kelas XII Kurikulum 2013.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan pendidikan kewarganegaraan global (*global civic education*). Adapun secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru pendidikan kewarganegaraan dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan global pada peserta didik di sekolah, khususnya Sekolah Menengah Atas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Global

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Artikel tertua yang membahas tentang *Civics* (Kewarganegaraan) pertama kali di tulis oleh Henry Randall Waite (Somantri, 2001: 281) dalam majalah *The Citizen* dan *Civics* terbit pada tahun 1886. Ia mengartikan *Civics* sebagai “*the science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collection, the individual in his relation to the state*”. Batasan ini menyiratkan bahwa *Civics* identik dengan Ilmu Kewarganegaraan yang membahas mengenai hubungan antara orang-orang dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi dan hubungan antara individu-individu dengan negara.

Definisi senada yang melengkapi dan memperjelas batasan yang dikemukakan Henry Randall Waite ditulis oleh Stanley Dimond (Somantri, 2001: 293) yang mengartikan *Civics* sebagai “*legal status in a country and the activities closely related to the political function, voting, government organization, holding of public office, and legal right and responsibility*”. Definisi ini lebih mengkonkritkan hubungan warga negara dalam bentuk yang lebih rinci, yakni dengan istilah “*political function*”, “*voting*”, dan “*holding of public office*”. Warga negara dalam suatu negara akan melakukan berbagai aktivitas terkait dengan fungsinya sebagai warga negara. Ia akan terlibat dalam aktivitas politik dan pemerintahan dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki. Agar dapat berfungsi sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) maka diperlukan pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*).

Pengertian yang lebih lengkap tentang *Civic Education* dikembangkan oleh *National Council for the Social Studies (NCSS)*. Perluasan batasan ini dengan tujuan ingin lebih melibatkan aspek-aspek pendidikan dan psikologi pendidikan serta memperhatikan perkembangan masyarakat akan perlunya *Civic Education* dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut

NCSS pendidikan kewarganegaraan adalah proses yang mencakup semua pengaruh positif yang dimaksudkan untuk membentuk pandangan warga negara terhadap perannya di masyarakat. Pengaruh-pengaruh positif terhadap perilaku warga negara berasal dari sekolah sebagai lembaga formal, lingkungan keluarga, dan lingkungan di luar rumah dan sekolah. Pengaruh-pengaruh positif tersebut diorganisasikan melalui pembelajaran *Civic Education* agar siswa dapat memahami cita-cita nasional, kepentingan umum, dan proses dalam sistem pemerintahannya sendiri (Somantri, 2001: 296).

Dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan disiplin ilmu terintegrasi yang mengkaji tentang warga negara dengan segala aktivitasnya dari berbagai macam sudut pandang. Pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu disiplin ilmu yang terintegrasi, memiliki keterkaitan erat dengan disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu-ilmu sosial, humaniora, filsafat, dan bahkan ilmu-ilmu alam. Dengan demikian, ruang lingkup kajian pendidikan kewarganegaraan sangat luas, tidak hanya terbatas pada persoalan hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan kewarganegaraan memiliki akar keilmuan dari ilmu politik, ilmu hukum, ilmu kewarganegaraan, dan ilmu pendidikan serta filsafat.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan tujuan yang dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional. Pada awal kemerdekaan, pendidikan nasional lebih diarahkan untuk membentuk semangat patriotisme yang mampu menghasilkan patriot bangsa yang rela berkorban untuk negara dan bangsa. Semangat patriotisme pada masa awal kemerdekaan sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka. Ciri warga negara Indonesia yang dikehendaki ketika itu antara lain, warga negara Indonesia yang memiliki perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada alam, negara, bangsa dan kebudayaan nasional, cinta dan bakti kepada Ibu dan Bapak, yang menyadari hak dan kewajibannya (Sumantri, 2011: 2).

Pendidikan kewarganegaraan dikembangkan untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Konsep inilah yang kemudian disebut sebagai paradigma baru pendidikan kewarganegaraan (*new civic education paradigm*). Warga negara yang baik (*good citizen*) bukan hanya warga negara yang cerdas dan terampil, melainkan juga berkarakter sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Warga negara yang baik (*good citizen*) sebagai tujuan dari pendidikan kewarganegaraan, menurut Chapin & Rosemary (1989: 126) adalah mereka yang mampu memelihara fasilitas umum dan dapat menolong orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Pendidikan kewarganegaraan menyiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang partisipatorik, memahami tentang sistem pemerintahan dan cara kerjanya, peran warga negara, memahami hak dan kewajiban, dan membiasakan untuk membuat pilihan dan keputusan dengan pertimbangan yang baik. Sedangkan Martorella (1994: 8) mendeskripsikan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang efektif (*effective citizen*), yaitu mereka yang bersifat reflektif, cakap, dan memiliki kepedulian.

Dari uraian tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Warga negara yang baik dapat diartikan sebagai warga negara yang memiliki berbagai kompetensi sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Warga negara yang baik sebagai tujuan dari pendidikan kewarganegaraan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan. Sikap kewarganegaraan berupa nilai-nilai yang dijadikan sebagai dasar pengembangan dua kompetensi lainnya, yakni pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan. Dengan demikian, warga negara yang akan dibentuk melalui pendidikan kewarganegaraan adalah warga negara yang cerdas, terampil, dan memiliki sikap yang baik. Oleh karena itu,

pendidikan kewarganegaraan diarahkan dalam rangka membentuk kompetensi-kompetensi tersebut melalui pembelajaran kewarganegaraan yang tidak hanya mengedepankan aspek pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga mengembangkan sikap warga negara yang baik.

3. Pendidikan Kewarganegaraan Global

Dalam perspektif yang lebih luas, tujuan pendidikan kewarganegaraan tidak sekadar membentuk warga negara yang baik dalam konteks nasional, melainkan juga dalam konteks global. Dinamika perkembangan di abad ke-21, menuntut konsepsi yang lebih luas mengenai tujuan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Banks (2008: 135) perlu konsepsi ulang mengenai pendidikan kewarganegaraan di era global abad ke-21, agar mampu mendidik siswa secara efektif menjadi warga negara yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Agar reformasi terhadap pendidikan kewarganegaraan dapat berhasil, maka harus ada perubahan *mainstream* dari pengetahuan akademik menuju pengetahuan akademik transformatif.

Pendidikan kewarganegaraan transformatif dapat dikembangkan di sekolah dan kelas. Siswa dikembangkan kemampuannya untuk memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang disebut Banks (2008: 136) sebagai *deep citizen*. Lebih lanjut, Banks mengembangkan sebuah tipologi yang dirancang untuk membantu pendidik mengkonseptualisasi cara untuk membantu siswa memperoleh kewarganegaraan yang lebih “mendalam”, yakni terdiri dari empat kategori kewarganegaraan. Keempat kategori ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) *Legal Citizenship*

Merupakan tingkat kewarganegaraan yang paling dangkal. Tipologi ini berlaku untuk warga negara yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara-bangsa dan memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu tetapi tidak berpartisipasi dalam sistem politik. Dengan kata lain, ia menjadi warga negara yang pasif.

2) *Minimal Citizenship*

Tipologi ini untuk menyebut warga negara yang sah dan ikut dalam dalam pemilihan lokal dan nasional. Warga negara dalam tipologi ini menjadi warga negara yang terlibat dalam menentukan pemimpin mereka. Partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dalam bentuk yang masih konvensional. Artinya, menentukan pilihan terhadap pemimpin terbatas pada sekadar berpartisipasi sebagai warga negara tanpa dilandasi argumentasi rasional terhadap pilihan mereka.

3) *Active Citizenship*

Tipologi ini sudah lebih berkembang dari tipologi sebelumnya. Warga negara melibatkan diri secara aktif tidak hanya sebatas dalam pemungutan suara untuk menentukan pemimpin mereka. Warga negara yang aktif dapat berpartisipasi dalam berbagai aksi, seperti demonstrasi atau membuat opini publik mengenai isu-isu yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tindakan warga negara yang aktif dirancang untuk mendukung dan menjaga struktur sosial dan politik.

4) *Transformative Citizenship*

Kewarganegaraan transformatif melibatkan tindakan warga negara yang dirancang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral serta cita-cita melampaui hukum dan kebiasaan yang berlaku pada suatu negara. Warga negara transformatif melakukan tindakan untuk mempromosikan keadilan sosial. Warga negara transformatif adalah mereka yang mampu berpartisipasi secara aktif dengan landasan argumentasi yang rasional, memiliki pemikiran yang kritis, dan berani menyuarakan kebenaran.

B. Nilai-nilai Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Global

Meskipun tidak ada definisi yang khusus dari “Kewarganegaraan Global”, menurut Morais & Ogden (2011: 447-448) setidaknya ada tiga dimensi yang sering disebut dalam literatur. Dimensi kewarganegaraan global ini dapat dikembangkan dalam pembelajaran kewarganegaraan di sekolah untuk membangun wawasan global warga negara muda. Dimensi-dimensi

kewarganegaraan global yang sering disebut dalam literatur antara lain sebagai berikut.

1) Tanggungjawab Sosial

Tanggung jawab sosial dipahami sebagai tingkat kesadaran saling ketergantungan dan kepedulian sosial kepada orang lain, masyarakat dan lingkungan. Pembelajaran kewarganegaraan di sekolah, melatih siswa untuk ikut serta bertanggung jawab mengevaluasi masalah-masalah sosial dan mengidentifikasi kasus atau contoh-contoh ketidakadilan dan kesenjangan global. Permasalahan yang muncul di era global sangat kompleks. Oleh karena itu, siswa berlatih untuk memiliki kemampuan atau keterampilan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan global yang muncul.

2) Kompetensi Global

Kompetensi global dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk memiliki pikiran yang terbuka dan secara aktif berusaha memahami norma-norma budaya orang lain dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja secara efektif. Kompetensi global dapat dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Menghadapi dunia global yang berubah dengan cepat, siswa perlu memiliki kompetensi global. Sebagai warga negara muda, siswa memiliki kesempatan yang luas untuk belajar dan berlatih mengembangkan pemahaman global.

3) Keterlibatan dalam Kewargaan Global

Keterlibatan dalam kehidupan kewargaan global dapat dimaknai sebagai tindakan dan atau kecenderungan untuk mengenali masalah-masalah kemasyarakatan baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global dan menanggapi melalui tindakan seperti kesukarelaan, aktivitas politik, dan partisipasi masyarakat. Siswa sebagai warga negara muda perlu dikembangkan kemampuannya untuk terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan global yang muncul.

Pendidikan kewarganegaraan global dikembangkan dengan memperhatikan berbagai aspek penting. Ada tiga unsur kunci yang dirumuskan Oxfam (2006: 4) untuk mengembangkan pendidikan kewarganegaraan global. Aspek-aspek yang dikembangkan merupakan unsur utama untuk membangun warga negara global yang bertanggungjawab, yakni: pengetahuan dan pemahaman (*knowledge and understanding*), keterampilan (*skills*), serta nilai dan sikap (*values and attitudes*). Ketiga unsur kunci ini dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan global.

Pengetahuan dan pemahaman global sangat penting bagi seorang warga negara global yang bertanggungjawab. Pengetahuan dan pemahaman yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan global meliputi beberapa hal penting antara lain: keadilan sosial dan kejujuran, keragaman, globalisasi dan saling ketergantungan, pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan konflik, dan keterampilan.

Nilai dan sikap dikembangkan untuk membentuk warga negara global yang berkarakter baik. Warga negara global yang akan dibentuk melalui pendidikan kewarganegaraan global, tidak hanya cerdas dan terampil, melainkan juga berkarakter baik. Nilai dan sikap yang dikembangkan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan global, antara lain meliputi: rasa identitas dan harga diri, empati, komitmen terhadap keadilan sosial dan kejujuran, menghormati keragaman, kepedulian terhadap lingkungan dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, dan keyakinan bahwa orang dapat menciptakan perbedaan.

C. Karakteristik Pembelajaran Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang harus dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) pasal 37 ayat (1) dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat “Pendidikan Kewarganegaraan”. Selanjutnya pada ayat (2) juga dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib

memuat “Pendidikan Kewarganegaraan”. Sementara itu pada bagian penjelasan pasal 37 dikemukakan bahwa “pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Pernyataan yang dimuat dalam undang-undang sisdiknas tersebut merupakan landasan yuridis formal pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan nasional.

Pendidikan kewarganegaraan yang diberikan di jenjang persekolahan harus dimaknai bahwa persoalan kewarganegaraan bukan sekadar membahas status legal-formal kewarganegaraan. Pemahaman tentang kewarganegaraan harus dimaknai secara lebih luas dan komprehensif. Pemahaman tentang kewarganegaraan yang hanya menjawab pertanyaan: “apa itu kewarganegaraan?” (*what is citizenship*) sudah tidak lagi memadai. Pertanyaan yang harus diajukan untuk memahami persoalan kewarganegaraan yang lebih luas dan komprehensif adalah dengan menjawab pertanyaan: “apa yang disebut dengan kewarganegaraan?” (*what is called citizenhsip*) (Isin, 2009). Lebih lanjut, Isin menjelaskan bahwa dalam membahas persoalan kewarganegaraan di era kontemporer, ada dua pertanyaan sentral yang diajukan, yaitu “apakah kewarganegaraan itu sebagai status atau praktik?” dan “apakah kewarganegaraan itu merupakan institusi yang mengontrol atau memberdayakan?”. Kedua pertanyaan sentral tersebut harus dijawab untuk mendapatkan kajian kewarganegaraan yang mendalam dan tidak parsial.

Kajian kewarganegaraan selama ini memang lebih banyak dilakukan di persekolahan dan dipahami hanya sebagai kajian mengenai status legal-formal kewarganegaraan. Konsepsi kewarganegaraan yang hanya berbasis kepada status legal-formal hanya membatasi dan sekaligus mereduksi pemahaman konsepsi kewarganegaraan yang lebih mendasar dan luas (Kalidjernih, 2011). Pemahaman yang parsial terhadap konsepsi kewarganegaraan ini, berdampak pada dangkalnya kajian kewarganegaraan. Praktik kewarganegaraan hanya terbatas pada persoalan undang-undang, hukum, dan peraturan belaka. Padahal kita tahu bahwa peraturan di negara kita seringkali dikalahkan oleh kepentingan kelompok tertentu. Peraturan yang dibuat hanya menguntungkan

sekelompok kecil golongan di negeri ini, sementara rakyat masih sering dirugikan.

Kompleksnya kajian mengenai kewarganegaraan, memerlukan upaya serius dari semua pihak, termasuk di dalamnya sekolah sebagai lembaga formal kultural, dalam upaya mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan yang hendak dicapai. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah, terutama pasca reformasi, mulai menunjukkan adanya perubahan ke arah paradigma baru (*new paradigm*) yang lebih mengarahkan peserta didik untuk berpikir kritis. Pendidikan kewarganegaraan lebih difokuskan pada tiga komponen dasar pengembangan seperti yang diajukan oleh Branson (1999) yang meliputi: *civic knowlegde*, *civic skills*, dan *civic disposition/traits*. Pola pengembangan kewarganegaraan paradigma baru ini mencoba menggeser pola lama pendidikan kewarganegaraan yang dianggap banyak memiliki kelemahan.

Menurut Wahab dan Sapriya (2011) ada beberapa kelemahan pendidikan kewarganegaraan di masa lalu. Kelemahan-kelemahan itu antara lain: (1) terlalu menekankan pada aspek nilai moral belaka yang menempatkan siswa sebagai obyek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai moral tertentu, (2) kurang diarahkan pada pemahaman struktur, proses, dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya, (3) pada umumnya bersifat dogmatis dan relatif, dan (4) berorientasi kepada kepentingan rezim yang berkuasa. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadikan pendidikan kewarganegaraan tidak berhasil dalam membentuk warga negara yang demokratis. Pembelajaran lebih bersifat indoktrinasi daripada demokratis. Pembelajaran yang mengekang kebebasan peserta didik dalam proses pembelajaran akan menjauhkan keberhasilan tujuan pembelajaran.

Prinsip pembelajaran yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan sudah bergeser dari prinsip "*what to think*" yang lebih bersifat indoktrinasi ke arah yang lebih menekankan aspek kebebasan, keterbukaan dan jati diri serta lebih berorientasi pada nilai-nilai demokratis, yaitu prinsip "*how to think*" (Wahab dan Sapriya, 2011). Prinsip ini lebih menekankan pada kemampuan untuk berpikir kritis sebagai salah satu aspek

penting dalam kehidupan yang demokratis. Pembelajaran yang demokratis memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi siswa untuk terbiasa berpikir kritis dan sistematis. Warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki sikap kritis terhadap berbagai persoalan yang ada di lingkungannya. Perbedaan prinsip pembelajaran tersebut membawa konsekuensi terhadap pemilihan strategi pembelajaran yang berbeda pula.

Pada prinsip yang pertama, apa yang akan dipelajari di kelas telah disiapkan, disusun, dan ditetapkan oleh negara. Sekolah tinggal menyampaikan apa yang telah ditetapkan oleh negara melalui guru. Bahan-bahan yang akan diberikan kepada siswa sudah diramu sedemikian rupa sehingga setelah pembelajaran selesai diharapkan pengetahuan dan perilaku siswa telah terbentuk sesuai dengan keinginan dan kehendak penguasa atau pemerintah yang sedang berkuasa (negara). Bahan-bahan atau materi yang dikembangkan diambil dari berbagai sumber formal seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan peraturan-peraturan lain yang dibuat pemerintah. Padahal aturan-aturan yang dibuat oleh negara merupakan bagian dari upaya mempertahankan kekuasaan politik pemerintah. Bahan-bahan pelajaran yang diberikan kepada para siswa tersebut secara singkat disebut sebagai doktrin politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diharapkan materi pelajaran disampaikan secara indoktrinatif dan guru berfungsi sebagai juru bicara atau corong dari pemerintah yang sedang berkuasa. Siswa tidak memiliki kebebasan untuk berpikir dan bertindak secara kritis (Wahab dan Sapriya, 2011).

Pada prinsip pembelajaran yang kedua, merupakan kebalikan dari prinsip pembelajaran yang pertama. Dalam prinsip pembelajaran yang menggunakan pendekatan *how to think*, siswa dikembangkan kemampuannya untuk berpikir kritis. Bahan-bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa ditetapkan secara desentralistik. Semangat ini sesuai dengan semangat reformasi yang lebih menuntut kemandirian dan tidak lagi bersifat sentralistik. Dalam pendekatan yang kedua ini, guru tidak lagi berperan sebagai corong

dari pemerintah yang sedang berkuasa. Guru bertindak sebagai tenaga pendidik profesional yang tidak hanya sekadar melaksanakan kurikulum saja, melainkan juga ikut serta dalam mengembangkan kurikulum. Guru sebagai pengembang kurikulum memiliki pengetahuan, kemampuan/kompetensi untuk dapat mendorong anak berpikir, berusaha dengan kemampuannya untuk dapat mencoba, mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Bahkan guru mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong dirinya untuk dapat menemukan sendiri dan melaporkannya (Wahab dan Sapriya, 2011). Prinsip ini lebih mengedepankan kemampuan siswa untuk mengikuti alur berpikir ilmiah. Metode yang sejalan dengan alur berpikir ilmiah yaitu metode pembelajaran inkuiri, yang meliputi: bertanya, menemukan, dan memecahkan masalah.

Metode pembelajaran yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran kewarganegaraan adalah metode pembelajaran yang lebih bersifat dialogis-kritis, pengalaman langsung (*direct experiences*), kolaboratif, dan kooperatif. Metode pembelajaran seperti ini menekankan pada tiga ranah pembelajaran, yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Kirschenbaum (1995) bahwa aspek *citizenship education* meliputi: *knowledge, appreciation, critical thinking skills, communication skills, cooperation skills, and conflict resolution skills*. Aspek-aspek tersebut lebih lanjut dinyatakan Kirschenbaum dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan secara komprehensif yang meliputi inkulkasi (*inculcaty*), pemodelan (*modeling*), fasilitasi (*facilitaty*), dan pengembangan keterampilan (*skills development*). Model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat diturunkan ke dalam berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pemilihan metode pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan sangat bergantung pada strategi pembelajaran yang digunakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis isi (*content analysis*). Menurut Fraenkel (2006: 483), analisis isi merupakan teknik penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mempelajari tingkah laku manusia dalam suatu cara yang tidak langsung melalui satu analisis pada komunikasi mereka. Unit analisis dalam penelitian ini adalah isi dari buku teks pegangan siswa pada mata pelajaran PPKn untuk Kelas XII Kurikulum 2013.

B. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan langsung pada buku teks siswa untuk mata pelajaran PPKn pada kelas XII berdasarkan kategorisasi yang telah ditentukan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Wujud data utama dalam penelitian ini berupa kata-kata, kalimat, wacana, dan gambar yang terdapat dalam buku teks siswa PPKn Kelas XII yang sudah digunakan di di sekolah-sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kartu data. Kartu data digunakan untuk mengumpulkan data dan mengklaisifikasinya berdasarkan kategori yang telah penulis tentukan.

C. Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah buku teks pegangan siswa kelas XII Kurikulum 2013. Analisis dilakukan untuk menemukan nilai-nilai kewarganegaraan global yang terkandung dalam buku tersebut dengan cara menganalisis tiap halaman pada setiap bab. Buku teks PPKn kelas XII dipilih karena dalam buku tersebut terdapat materi yang banyak menyangkut tentang kewarganegaraan global. Bagian yang dianalisis berupa paragraf-paragraf, pertanyaan-pertanyaan, gambar, tabel, dan kegiatan belajar dalam buku teks tersebut.

D. Analisis Data

Kajian isi dokumen secara kualitatif dengan teknik *coding* terhadap nilai kewarganegaraan global yang terdapat dalam buku teks siswa PPKn kelas XII baik tampilan verbal (kata-kata, kalimat, wacana) maupun visual (gambar) yang memiliki makna nilai-nilai kewarganegaraan global. Teknik analisis dilakukan dengan langkah-langkah berikut.

1. Data diseleksi dengan menggunakan lembar survei buku untuk menentukan nilai-nilai kewarganegaraan global.
2. Membuat lembar survei buku.
3. Data kemudian diklasifikasikan sesuai lembar survei dengan indikator yang dikembangkan dari teori.
4. Bab yang dianalisis kemudian diambil dari seluruh bab yang ada pada buku yang dianalisis.
5. Menganalisis unit analisis tiap halaman pada bab yang dianalisis berupa paragraf-paragraf, pertanyaan-pertanyaan, gambar, tabel, dan aktivitas pembelajaran.
6. Menganalisis setiap halaman bab yang dianalisis dan mencocokkannya dengan indikator.
7. Data kemudian diinterpretasikan dengan menghitung kemunculan (frekuensi) dan persentase indikator-indikator dari tiap aspek nilai kewarganegaraan global yang dianalisis dan mendeskripsikannya dalam bentuk diagram.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang dianalisis dalam penelitian ini adalah buku siswa terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini terdiri dari 7 (tujuh) bab, yang masing-masing bab antara lain: (1) Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila, (2) Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman, (3) Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia, (4) Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara, (5) Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional, (6) Strategi Indonesia dalam Menyelesaikan Ancaman Terhadap Negara, dan (7) Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal.

Masing-masing bab dianalisis terkait apa saja nilai-nilai kewargaegaraan global yang dimuat dan nilai kewarganegaraan apa yang paling dominan atau sering muncul dalam pembahasan di buku. Dari analisis buku yang telah dilakukan dapat ditemukan ada 19 nilai-nilai kewarganegaraan global yang muncul atau ditemukan dalam buku teks siswa PPKn kelas XII Kurikulum 2013. Nilai-nilai kewarganegaraan global yang muncul yakni: (1) keadilan sosial dan kejujuran, (2) menghormati keragaman, (3) kepedulian terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, (4) globalisasi dan saling ketergantungan, (5) perdamaian dan konflik, (6) berpikir kritis, (7) kemampuan berpendapat secara kritis, (8) kemampuan melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan, (9) menghormati orang lain, (10) kerjasama dan resolusi konflik, (11) rasa identitas dan harga diri, (12) empati dan rasa kemanusiaan, (13) menghargai perbedaan, (14) kesenjangan dan keadilan sosial, (15) peduli, (16) tanggungjawab pribadi dan saling keterkaitan global, (17) kesadaran diri, (18) komunikasi antarbudaya, dan (19) pengetahuan global.

Nilai-nilai kewarganegaraan global yang muncul dalam buku teks siswa PPKn Kelas XII, berupa deskripsi yang ada dalam uraian materi maupun berupa deskripsi penugasan kepada siswa. Masing-masing nilai muncul sesuai bahasan topik yang ada di setiap bab, sehingga ada kalanya nilai itu muncul sebagai nilai dominan dalam satu bab, tetapi di lain bab dapat tidak muncul sama sekali. Secara keseluruhan nilai-nilai kewarganegaraan sudah muncul di setiap bab atau pokok bahasan.

Secara berurutan, nilai-nilai kewarganegaraan yang muncul dalam buku teks siswa PPKn kelas XII dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Nilai-nilai Kewarganegaraan global dalam buku teks siswa PPKn Kelas XII

No.	Nilai-nilai Kewarganegaraan Global
1.	Kemampuan berpendapat secara efektif
2.	Berpikir kritis
3.	Kemampuan melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan
4.	Menghargai perbedaan
5.	Empati dan rasa kemanusiaan
6.	Perdamaian dan konflik
7.	Keadilan sosial dan kejujuran
8.	Menghormati orang lain
9.	Komunikasi antarbudaya
10.	Pengetahuan global
11.	Kerjasama dan resolusi konflik
12.	Kesenjangan dan keadilan sosial
13.	Menghormati keragaman
14.	Kesadaran diri
15.	Kepedulian terhadap lingkungan dan pembanguna berkelanjutan
16.	Globalisasi dan saling ketergantungan
17.	Rasa identitas dan harga diri
18.	Tanggungjawab pribadi dan saling keterkaitan global
19.	Peduli

Dari analisis setiap bab dalam buku teks siswa PPKn Kelas XII, menunjukkan bahwa nilai-nilai kewarganegaraan global yang dimuat cukup baik. Dari 19 nilai-nilai kewarganegaraan global yang muncul dalam buku teks siswa PPKn Kelas XII, dapat dilihat bahwa nilai kewarganegaraan global

yang paling sering muncul atau dominan adalah kemampuan berpendapat secara kritis, kemudian disusul nilai kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan sebagai tiga nilai kewarganegaraan global yang paling sering muncul di buku teks siswa PPKn Kelas XII.

Sementara nilai kewarganegaraan global yang paling jarang muncul dalam buku teks siswa PPKn Kelas XII yaitu peduli, tanggungjawab pribadi dan saling keterkaitan global, serta rasa identitas dan harga diri. Namun demikian, meskipun jarang muncul dalam uraian buku teks siswa PPKn Kelas XII, nilai-nilai kewarganegaraan seperti telah disebut tetap menjadi bagian penting yang perlu dikembangkan dan dimiliki oleh warga negara. Kemunculan nilai-nilai kewarganegaraan global yang ada dalam buku teks PPKn kelas XII juga dipengaruhi kompetensi dasar yang akan dikembangkan menjadi bahan ajar. Jika kompetensi dasar yang akan dikembangkan memiliki keterkaitan dengan kewarganegaraan global, seperti peran Indonesia dalam hubungan interasional, maka nilai-nilai kewarganegaraan global akan seringkali muncul.

Nilai-nilai kewarganegaraan global yang muncul dalam buku teks siswa PPKn perlu dikembangkan oleh guru melalui pembelajaran kewarganegaraan di kelas. Guru harus mampu mengembangkan dan menciptakan metode pembelajaran yang memungkinkan nilai-nilai kewarganegaraan global dapat diinternalisasikan pada diri peserta didik. Guru perlu juga mengembangkan pengetahuan atau wawasan global, agar dalam mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan global tidak mengalami kesulitan. Nilai-nilai kewarganegaraan global menjadi bagian penting yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran kewarganegaraan dalam rangka membangun warga negara yang baik yang memiliki pengetahuan dan wawasan global.

B. Pembahasan

Dari data hasil penelitian yang telah diuraikan menunjukkan bahwa ada 19 nilai-nilai kewarganegaraan global yang muncul dalam buku teks siswa PPKn kelas XII. Nilai-nilai itu sangat penting untuk dikembangkan di era global seperti sekarang. Warga negara harus memiliki pengetahuan dan wawasan global, agar mampu melakukan interaksi dan dapat berkomunikasi dengan warga negara lain di dunia. Nilai-nilai kewarganegaraan global yang ada dalam buku teks PPKn dapat dianalisis sebagai berikut.

Menurut Morais & Ogden (2011: 447-448) setidaknya ada tiga dimensi yang sering disebut dalam literatur. Dimensi kewarganegaraan global ini dapat dikembangkan dalam pembelajaran kewarganegaraan di sekolah untuk membangun wawasan global warga negara muda. Siswa berlatih dan belajar bersama guru dan temannya untuk mengembangkan dimensi-dimensi kewarganegaraan global agar siap menjadi warga negara global yang cerdas dan berkarakter. Dimensi-dimensi kewarganegaraan global yang sering disebut dalam literatur antara lain sebagai berikut.

1. Tanggungjawab Sosial

Tanggung jawab sosial dipahami sebagai tingkat kesadaran saling ketergantungan dan kepedulian sosial kepada orang lain, masyarakat dan lingkungan. Pembelajaran kewarganegaraan di sekolah, melatih siswa untuk ikut serta bertanggung jawab mengevaluasi masalah-masalah sosial dan mengidentifikasi kasus atau contoh-contoh ketidakadilan dan kesenjangan global. Permasalahan yang muncul di era global sangat kompleks. Oleh karena itu, siswa berlatih untuk memiliki kemampuan atau keterampilan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan global yang muncul.

Siswa berlatih menghormati perbedaan dan membangun etika pelayanan sosial untuk mengatasi isu-isu global dan lokal. Mereka memahami keterkaitan antara perilaku lokal dan konsekuensi global mereka. Siswa ditumbuhkan kesadarannya bahwa di era global mereka akan bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki

beragam latar belakang yang berbeda. Perbedaan itu bukan hanya dalam hal budaya yang ada di satu negara, tetapi sudah melintasi batas-batas wilayah negara (*transnational*). Sebagai warga negara global, siswa berlatih untuk memiliki tanggungjawab sosial yang sangat diperlukan di era global. Dimensi tanggungjawab sosial memiliki tiga sub dimensi yang masing-masing dapat dikembangkan dalam pembelajaran kewarganegaraan di sekolah. Ketiga sub-dimensi itu antara lain sebagai berikut.

(a) Kesenjangan dan Keadilan Global

Siswa mengevaluasi isu-isu sosial dan mengidentifikasi kasus dan contoh-contoh ketidakadilan dan kesenjangan global. Perkembangan ekonomi yang pesat di negara maju mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perekonomian negara maju terus tumbuh dan berkembang meninggalkan perkembangan ekonomi negara-negara berkembang. Di satu sisi, kemajuan ekonomi dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Namun, pada sisi yang lain, terjadi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Ketimpangan ini menjadi bagian dari permasalahan global yang perlu dipecahkan.

Ketimpangan dan ketidakadilan global menarik untuk dijadikan sebagai bahan kajian dalam pembelajaran di kelas. Siswa berlatih dan belajar untuk memecahkan permasalahan ketimpangan dan ketidakadilan global dengan menggunakan sumber-sumber pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar. Siswa dapat memanfaatkan internet untuk melihat permasalahan yang disebabkan karena ketimpangan dan ketidakadilan global. Permasalahan itu dapat didiskusikan dan dipecahkan bersama teman-teman dan guru di kelas.

(b) Empati dan Peduli

Siswa mempelajari dan menghormati perspektif yang beragam dan membangun etika pelayanan sosial untuk mengatasi isu-isu global dan lokal. Menurunnya rasa empati dan kepedulian sosial menjadi persoalan mendasar yang perlu mendapatkan pemecahan. Empati merupakan perasaan untuk bisa merasakan apa yang sedang dialami

oleh orang lain. Siswa yang memiliki empati tinggi biasanya akan peduli terhadap penderitaan atau kesedihan yang sedang dialami temannya. Melatih siswa memiliki empati memerlukan proses belajar yang panjang melalui pembiasaan. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan rasa empati yang dimiliki siswa.

Selain empati, siswa juga perlu mengembangkan sikap peduli (*altruism*) terhadap orang lain. Kehidupan di era global yang semakin individualis dan materialitis seringkali menjauhkan siswa dari rasa peduli. Siswa lebih mementingkan kepentingannya sendiri dan seringkali mengabaikan kepentingan orang lain. Ketidakpedulian terhadap penderitaan yang sedang dialami orang lain sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Selama ini, semangat gotong-royong menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia yang telah lama mengakar. Budaya luhur bangsa seperti gotong-royong dapat dikembangkan melalui pembelajaran di kelas. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting untuk mengembangkan sikap kepedulian siswa sebagai warga negara muda. Empati dan kepedulian yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan bukan sekadar dalam konteks lokal dan nasional, melainkan harus lebih luas dan berskala global.

(c) Tanggungjawab Pribadi dan Saling Keterkaitan Global

Siswa memahami keterkaitan antara perilaku lokal dan konsekuensi global. Perilaku yang dilakukan siswa, tidak lagi berdampak pada perubahan yang terjadi dalam skala lokal. Siswa dapat memainkan peran lebih luas dalam skala global. Untuk melakukan perilaku yang berdampak pada kehidupan lokal mupaun global, siswa perlu memiliki tanggungjawab pribadi. Perilaku yang dilakukan selalu berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional yang telah dipikirkan dengan matang. Siswa memahami bahwa perilaku yang

dilakukan dalam skala lokal akan berdampak pada kehidupan berskala global.

Pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengembangkan tanggungjawab pribadi siswa. Pembelajaran yang dikembangkan melatih siswa untuk memiliki tanggungjawab pribadi. Siswa diberikan berbagai permasalahan atau kasus-kasus untuk dipecahkan. Melalui pembelajaran dialogis-kritis, siswa dilatih dan dikembangkan tanggungjawabnya sebagai warga negara muda. Semua perilaku yang dilakukan, baik dalam skala lokal maupun global, harus mampu dipertanggungjawabkan. Setiap perilaku yang dilakukan akan memiliki konsekuensi. Siswa harus siap untuk menerima konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari perilaku yang telah dilakukan.

2. Kompetensi Global

Kompetensi global dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk memiliki pikiran yang terbuka dan secara aktif berusaha memahami norma-norma budaya orang lain dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja secara efektif. Kompetensi global dapat dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Menghadapi dunia global yang berubah dengan cepat, siswa perlu memiliki kompetensi global. Sebagai warga negara muda, siswa memiliki kesempatan yang luas untuk belajar dan berlatih mengembangkan pemahaman global.

Siswa yang memiliki kompetensi global mengakui keterbatasan yang dimiliki dan berusaha untuk terlibat dalam pertemuan antarbudaya. Mereka menunjukkan berbagai keterampilan komunikasi antarbudaya dan memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pertemuan antarbudaya yang beragam. Siswa yang memiliki kompetensi global menunjukkan ketertarikan dan pengetahuannya tentang isu-isu dan peristiwa yang terjadi dunia. Dimensi kompetensi global dapat dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan

pendekatan berpikir kritis. Dimensi kompetensi global, memiliki tiga subdimensi antara lain sebagai berikut.

(a) Kesadaran Diri

Siswa menyadari keterbatasan diri mereka sendiri dan kemampuan untuk terlibat dalam pertemuan antarbudaya. Siswa sebagai bagian dari warga dunia, akan bertemu atau bersentuhan dengan budaya lain. Negara-negara yang ada di dunia memiliki budaya yang sangat beragam. Siswa perlu dikembangkan kesadaran dirinya bahwa ia memiliki keterbatasan. Kemampuan siswa untuk terlibat secara langsung dalam pertemuan antarbudaya sangat terbatas. Ia tidak mungkin dapat terlibat dalam semua pertemuan antarbudaya. Namun, budaya-budaya dari negara yang ada di dunia dapat dipelajari melalui pembelajaran di kelas.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting untuk mengenalkan keragaman budaya dunia. Siswa perlu ditumbuhkan kesadaran dirinya bahwa keragaman yang ada di dunia bukan untuk dipertentangkan. Perbedaan budaya yang ada di dunia harus dihormati dan dihargai. Siswa memiliki keterbatasan, termasuk untuk secara langsung mempelajari semua budaya-budaya yang ada di dunia. Melalui pembelajaran kewarganegaraan, siswa ditumbuhkan kesadaran dirinya mengenai keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki.

(b) Komunikasi Antarbudaya

Siswa menunjukkan keterampilan komunikasi antarbudaya dan memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pertemuan antarbudaya. Seni dan budaya dapat dengan mudah melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Budaya suatu negara dapat dengan mudah masuk dan berkembang di negara lain. Agar dapat masuk dan diterima oleh negara lain, perlu komunikasi antarbudaya. Komunikasi antarbudaya perlu dilakukan agar budaya yang datang tidak bertentangan dengan budaya yang ada di suatu negara. Saling memahami antarbudaya yang berbeda

dari negara-negara yang ada di dunia dapat menumbuhkan semangat untuk saling menghormati perbedaan.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa dikembangkan keterampilannya untuk mampu mengomunikasikan dengan baik budaya yang dimiliki kepada negara lain. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya melimpah menjadi daya tarik tersendiri bagi warga negara lain untuk datang dan belajar budaya di Indonesia. Keterampilan komunikasi antarbudaya yang dimiliki siswa dapat dikembangkan melalui pengembangan pembelajaran kewarganegaraan kontekstual. Siswa dapat belajar secara langsung tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia.

(c) Pengetahuan Global

Siswa menampilkan minat dan pengetahuan tentang isu-isu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Peristiwa yang terjadi suatu negara, sangat mudah dan cepat menjadi isu utama di negara lain. Kemajuan teknologi internet memudahkan siswa untuk berselancar mencari dan menemukan isu-isu aktual terkini yang terjadi di negara-negara lain. Bahkan, kecenderungan yang terjadi di suatu negara dapat dengan mudah mempengaruhi kehidupan masyarakat di negara lain. Bagi warga negara muda, kecenderungan seperti *life style*, dapat dengan mudah mempengaruhi kehidupannya.

Bagi siswa sebagai warga negara muda, kemajuan teknologi internet dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan global. Siswa dapat belajar tentang ekonomi, politik, sejarah, teknologi, dan ilmu-ilmu lain dengan bantuan internet. Pendidikan kewarganegaraan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti internet, untuk mengembangkan pemahaman global siswa. Isu-isu dunia seperti penegakkan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi dapat dijadikan sebagai tema menarik untuk pembelajaran kewarganegaraan. Melalui pembelajaran kewarganegaraan yang menyajikan isu-isu global, dapat menarik perhatian siswa untuk belajar kewarganegaraan.

3. Keterlibatan dalam Kewargaan Global

Keterlibatan dalam kehidupan kewargaan global dapat dimaknai sebagai tindakan dan atau kecenderungan untuk mengenali masalah-masalah kemasyarakatan baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global dan menanggapi melalui tindakan seperti kesukarelaan, aktivitas politik, dan partisipasi masyarakat. Siswa sebagai warga negara muda perlu dikembangkan kemampuannya untuk terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan global yang muncul.

Keterlibatan dalam hidup kewargaan (*civic engagement*) merupakan salah satu unsur penting dari modal sosial (*social capital*). *Civic engagement* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan partisipasi politik warga negara (Milner, 2002, hlm. 25; Mujani, 2007, hlm. 26). Keterampilan berpartisipasi (*participation skills*) dalam kehidupan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global dapat dilatih melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah.

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan dialogis-kritis dapat menumbuhkan keterampilan dan kemampuan siswa untuk terlibat secara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Siswa dapat terlibat secara langsung dan berkontribusi untuk menjadi sukarelawan bekerja atau membantu organisasi sipil global. Mereka membangun aspirasi politik dengan melakukan sintesis pengetahuan dan pengalaman global dalam domain publik. Siswa dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas politik di tingkat lokal maupun nasional yang bertujuan memajukan agenda global.

Dimensi keterlibatan warga global memiliki tiga sub dimensi. Masing-masing sub dimensi itu dijelaskan sebagai berikut.

(a) Keterlibatan dalam Organisasi Kemasyarakatan

Siswa terlibat atau berkontribusi untuk bekerja secara sukarela atau membantu organisasi sipil global. Organisasi sipil global tumbuh dan berkembang seiring dengan banyaknya permasalahan global yang

muncul di berbagai negara di dunia. Organisasi tersebut membantu pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah global yang dialami hampir di setiap negara. Organisasi sipil global bermacam-macam jenisnya, seperti yang bergerak di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan lain-lain. Siswa dapat memilih sesuai dengan kemampuan untuk terlibat atau berkontribusi secara sukarela dalam organisasi sipil global.

Pendidikan kewarganegaraan membantu para siswa untuk mengembangkan keterampilan agar ia mampu berkontribusi dan terlibat dalam organisasi sipil global. Siswa dapat mencurahkan waktu untuk secara sukarela membantu pelaksanaan program-program yang dikembangkan oleh organisasi sipil global. Melalui keterlibatan dalam organisasi sipil global siswa bisa mendapatkan pengalaman yang berguna bagi kehidupan. Siswa juga dapat mengembangkan kepedulian sosial dengan terlibat secara langsung dalam organisasi sipil global.

(b) Aspirasi Politik

Siswa membangun aspirasi politik mereka dengan mensintesis pengetahuan dan pengalaman global dalam domain publik. Siswa dapat berlatih dan belajar menyampaikan aspirasi politik mereka melalui pembelajaran kewarganegaraan. Aspirasi dapat berbentuk kritik terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Siswa dikembangkan kemampuan dan pengalamannya baik dalam skala lokal maupun global. Pengalaman global yang dimiliki siswa dapat dijadikan sebagai media untuk mengembangkan aspirasi politik.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mengembangkan keterampilan siswa untuk membangun aspirasi politik. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada siswa agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan dapat mengembangkan

wawasan global siswa agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan global. Siswa mampu berperan sebagai warga global yang aktif melalui partisipasinya dalam mempengaruhi kebijakan publik.

(c)Aktivisme Warga Negara Global

Siswa terlibat dalam perilaku bermanfaat yang dapat memajukan agenda global. Ada beberapa isu global yang perlu mendapatkan perhatian serius dari warga negara global. Isu-isu global itu antara lain: kemiskinan dan kesenjangan global, lingkungan dan pemanasan global, krisis pangan dunia, terorisme, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Isu-isu global tersebut menjadi agenda global yang mendesak untuk segera direalisasikan. Siswa dapat memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi mensukseskan agenda global. Melalui aktivitas sebagai warga negara global, siswa dapat memainkan peran baik dalam skala lokal maupun global.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa belajar untuk memiliki kepekaan terhadap isu-isu global yang sedang berkembang. Siswa dapat belajar dan berlatih untuk terlibat secara aktif menyelesaikan berbagai permasalahan global. Perilaku yang dilakukan siswa adalah perilaku yang bermanfaat untuk memajukan agenda global. Keterlibatan siswa sebagai warga negara muda sangat diperlukan agar agenda global dapat tercapai. Kesuksesan atau keberhasilan agenda global dalam menyelesaikan permasalahan global perlu mendapat dukungan dari seluruh warga di dunia.

Tiga dimensi global yang telah dijelaskan di atas, jika dicermati secara seksama, merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran kewarganegaraan. Melalui pembelajaran kewarganegaraan, siswa dibekali dengan berbagai kemampuan dan keterampilan sebagai warga negara muda. Keterampilan seperti tanggungjawab sosial, kompetensi sebagai warga negara global, dan keterlibatan dalam aktivitas politik merupakan bagian penting yang harus dikembangkan. Agar siswa dapat menguasai keterampilan-keterampilan hidup sebagai warga negara seperti telah disebutkan,

pembelajaran kewarganegaraan perlu dikembangkan dengan menggunakan pendekatan dan strategi pembelajaran yang tepat.

Pendidikan kewarganegaraan global dikembangkan dengan memperhatikan berbagai aspek penting. Ada tiga unsur kunci yang dirumuskan Oxfam (2006: 4) untuk mengembangkan pendidikan kewarganegaraan global. Aspek-aspek yang dikembangkan merupakan unsur utama untuk membangun warga negara global yang bertanggungjawab, yakni: pengetahuan dan pemahaman (*knowledge and understanding*), keterampilan (*skills*), serta nilai dan sikap (*values and attitudes*). Ketiga unsur kunci ini dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan global.

Pengetahuan dan pemahaman global sangat penting bagi seorang warga negara global yang bertanggungjawab. Pengetahuan dan pemahaman yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan global meliputi beberapa hal penting antara lain: keadilan sosial dan kejujuran, keragaman, globalisasi dan saling ketergantungan, pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan konflik, dan keterampilan.

Warga negara global juga perlu memiliki berbagai keterampilan agar dapat berperan secara efektif dalam kehidupan global. Keterampilan-keterampilan yang dikembangkan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan global, antara lain meliputi hal-hal penting antara lain: berpikir kritis, kemampuan berpendapat secara efektif, kemampuan melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan, menghormati orang lain, kerjasama, dan resolusi konflik.

Nilai dan sikap dikembangkan untuk membentuk warga negara global yang berkarakter baik. Warga negara global yang akan dibentuk melalui pendidikan kewarganegaraan global, tidak hanya cerdas dan terampil, melainkan juga berkarakter baik. Nilai dan sikap yang dikembangkan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan global, antara lain meliputi: rasa identitas dan harga diri, empati, komitmen terhadap keadilan sosial dan kejujuran, menghormati keragaman, kepedulian terhadap lingkungan dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, dan keyakinan bahwa orang dapat menciptakan perbedaan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut.

1. Nilai-nilai kewarganegaraan yang dimuat dalam buku teks siswa PPKn Kelas XII ada 19, yaitu: : (1) keadilan sosial dan kejujuran, (2) menghormati keragaman, (3) kepedulian terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, (4) globalisasi dan saling ketergantungan, (5) perdamaian dan konflik, (6) berpikir kritis, (7) kemampuan berpendapat secara kritis, (8) kemampuan melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan, (9) menghormati orang lain, (10) kerjasama dan resolusi konflik, (11) rasa identitas dan harga diri, (12) empati dan rasa kemanusiaan, (13) menghargai perbedaan, (14) kesenjangan dan keadilan sosial, (15) peduli, (16) tanggungjawab pribadi dan saling keterkaitan global, (17) kesadaran diri, (18) komunikasi antarbudaya, dan (19) pengetahuan global.
2. Nilai kewarganegaraan global yang paling dominan atau seringkali muncul dalam setiap bab yaitu nilai kemampuan untuk berpendapat secara efektif. Nilai ini menjadi nilai kewarganegaraan global yang paling sering muncul di setiap bab, terutama di bab yang membahas tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional.

B. Saran

Dari simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa saran sebagai berikut.

1. Nilai-nilai kewarganegaraan global penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran PPKn di sekolah, oleh karena itu guru harus mampu mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan nilai-nilai kewarganegaraan global dapat terinternalisasi dengan baik kepada peserta didik.

2. Agar internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dapat berhasil dengan baik guru perlu memiliki kemampuan dan pengetahuan global. Guru tidak hanya berfokus pada persoalan regional atau nasional, melainkan harus mampu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.
3. Nilai kewarganegaraan global berupa kemampuan untuk berpendapat secara efektif merupakan salah satu nilai yang paling sering muncul dalam buku teks siswa PPKn Kelas XII, oleh karena itu guru perlu mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan nilai itu dapat dipahami dengan baik dan dapat diinternalisasikan pada peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbaria, A. K. (2011). The social studies education discourse community on globalization: exploring the agenda of preparing for the global age. *Journal of Studies in International Education*, 15 (1), hlm. 57-74.
- Bourke, L., Bamber, P., & Lyons, M. (2012). Global citizens: who are they?. *Education, Citizenship and Social Justice*, 7 (2), hlm. 161-174.
- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37 (3), hlm. 129-139.
- Branson, M.S. (Ed.). (1999). *Belajar civic education dari Amerika*. (Terjemahan Syafruddin, dkk.) Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) dan The Asia Foundation (TAF).
- Chapin, J. R. & Rosemary, G. M. (1989). *Elementary Social Studies: A Practical Guide* (Second ed.). New York: Longman.
- Fraenkel, J. R. (1977). *How to teach about values: An analytic approach*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Gainous, J. & Martens, M. (2012). The effectiveness of civic education: are “good” teachers actually good for “all” students?. *American Politics Research*, 40 (2), hlm. 232-266.
- Isin, E.F. (2009). “Citizenship in flux: the figure of the activist citizen”. *Subjectivity*. Issue 29. pp. 367-388.
- Kalidjernih, F.K. (2011). *Puspa ragam konsep dan isu kewarganegaraan*. Edisi kedua. Bandung: Widya Aksara Press.
- Kim, B. J., Kavanaugh, A. L., & Hult, K. M. (2011). Civic engagement and internet use in local governance: hierarchial linear models for understanding the role of local community groups. *Administration & Society*, 43 (7), hlm. 807-835.
- Kompas. (2012). *Komitmen Daerah Rendah, Eksploitasi Terus Berjalan*. Selasa, 30 Oktober 2012. Hlm. 14.
- Martorella, P.H. (1994). *Social studies for elementary school children: developing young citizens*. New York: Macmillan College.

- Morais, D.B. & Ogden, A.C. (2011). Initial development and validation of the global citizenship scale. *Journal of Studies in International Education*, 15 (5), hlm. 445-446.
- Parker, W.C., Ninomiya, A., & Cogan, J. (1999). Educating world citizens: toward multinational curriculum development. *American Educational Research Journal*, 36 (2), hlm. 117-145.
- Somantri, M.N. (2001). *Menggagas pembaharuan IPS*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sumantri, E. (2011). Pendidikan Budaya dan Karakter Suatu Keniscayaan Bagi Kesatuan dan Persatuan Bangsa. Dalam D. Budimansyah (Penyunting), *Pendidikan karakter: nilai inti bagi upaya pembinaan kepribadian bangsa* (hlm. 1-11). Bandung: Widya Aksara Press.
- Titus, C. (1999). Civic education untuk pemahaman global. Dalam M.S. Branson, dkk. (Penyunting), *Belajar civic education dari Amerika* (hlm. 131-140), alih bahasa Syafruddin, M.Y. Alimi, & M. N. Khoiron. Yogyakarta: LKIS dan The Asia Foundation (TAF).
- Wahab, A.A. dan Sapriya. (2011). *Teori dan landasan kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Zamroni. (2007). *Pendidikan dan demokrasi dalam transisi: prakondisi menuju era globalisasi*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.